

BAB VI

KESIMPULAN

Bab ini akan menyajikan kesimpulan terhadap semua hasil penelitian yang telah diperoleh. Setelah melakukan pengkajian terhadap permasalahan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Di Indonesia. Ekonomi Terpimpin didefinisikan sebagai salah satu sistem ekonomi yang lahir sebagai dampak dari pelaksanaan sistem politik yaitu imbas pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam ekonomi pada tahun 1959-1965 di Indonesia dan menggantikan sistem Ekonomi Liberal. Dalam Ekonomi Terpimpin yang bersifat berencana. ekonomi berada dalam pengawasan pemerintah sehingga campur tangan pemerintah dalam ekonomi terbilang dominan. Secara umum Ekonomi Terpimpin bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan negara yang rumit dan kompleks, dimana setiap masalah negara saling berkaitan satu sama lain sistem ekonomi ini muncul. Situasi politik yang kacau akibat pergantian kabinet yang cepat sehingga tidak jelasnya arah dari kebijakan-kebijakan yang dibuat, pertentangan antar elit politik hingga pertentangan antara pusat dan daerah akibat ketidakseimbangan pembangunan pada akhirnya telah mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia menjadi semakin buruk dan tidak terkendalkan.

Kemacetan politik yang hadir pada saat itu kemudian dijawab Soekarno dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan merubah sistem politik

Indonesia dari Liberal menjadi Terpimpin, sedangkan kemacetan ekonomi akibat pelaksanaan Ekonomi Liberal dijawab Soekarno dengan pelaksanaan Ekonomi Terpimpin sebagai penjabaran dari Manifesto Politiknya (Manipol). Ekonomi Terpimpin dalam pelaksanaannya ditandai dengan munculnya berbagai program dan kebijakan seperti Depernas (Dewan Perancang Nasional), yang dilanjutkan dengan program Dekon (Deklarasi Ekonomi) dan ekonomi Berdikari (Berdiri diatas kaki sendiri) yang hadir dengan tujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Melalui Depernas (Dewan Perancang Nasional) pemerintah kemudian mengeluarkan program Pembangunan Nasional Semesta Berencana pada tahun 1961. Depernas sebagai program ekonomi dianggap sebagai program yang fantastis, karena selain terbagi menjadi dua proyek A dan B juga karena proyek ini tidak jelas berkaitan dengan sumber keuangannya. Ternyata pelaksanaan dari Ekonomi Terpimpin melalui Depernas tidaklah selancar yang direncanakan dan mengakibatkan kemerosotan ekonomi.

Kemerosotan ekonomi yang terjadi akibat tidak lancarnya pembangunan yang direncanakan oleh Depernas (Dewan Perancang Nasional) dijawab oleh pemerintah dengan mengeluarkan program Dekon (Deklarasi Ekonomi) sebagai basic dari strategi ekonomi dan terdiri dari 14 buah peraturan dalam bidang impor, ekspor dan lain-lain yang diadakan guna memperbaiki kesulitan ekonomi yang disebut peraturan 26 Mei 1963.

Dekon (Deklarasi Ekonomi) pun kemudian tidak bertahan lama karena pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru bagi negeri yang

mulai sakit bahkan semakin parah setelah timbulnya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan Indonesia keluar dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan kehilangan ahli-ahli pembangunan dari luar negeri. Kebijakan itu adalah program Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri sebagai program untuk penyelamatan ekonomi yang dilakukan dengan cara pengusahaan segala sesuatu berdasar pada kemampuan sendiri, namun berakibat pada surutnya penanaman modal asing. Program Berdikari (Berdiri Diatas Kaki Sendiri). Berdikari berasal dari pidato Soekarno pada April 1965 dan merupakan pegasan politik Indonesia yang tidak mau bergantung pada luar negeri. Pada masa Berdikari, Indonesia menutup diri dari dunia luar sehingga tertinggal dari perkembangan internasional.

Kemauan politik yang lebih besar dibanding kemauan ekonomi dari para elit politik pada saat itu telah mengakibatkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin menjadi tidak berarti bahkan mengakibatkan kemuduran ekonomi Indonesia. Akibatnya perekonomian Indonesia mengalami masa-masa kritis dan berakibat pada kehancuran negara dan kemiskinan bagi hampir seluruh rakyat pada periode-periode tersebut. Tingkat inflasi yang mencapai 635% pada akhir 1966 dan hancurnya sendi-sendi ekonomi Indonesia baik itu moneter, perbankan, perdagangan dan yang lainnya telah menjadi bukti nyata bahwa sistem Ekonomi Terpimpin tidak berhasil diterapkan di Indonesia.

Meskipun secara umum dianggap tidak berhasil dalam pelaksanaannya yang diwakili oleh kata inflasi, namun kita juga tidak boleh menutup mata bahwa dari pelaksanaan Ekonomi Terpimpin Indonesia juga menikmati efek positifnya.

Sarana-sarana publik yang banyak dibangun pada masa Ekonomi Terpimpin sebagai bagian dari politik *mercusuar* nyatanya bermanfaat bagi negara ataupun rakyat meskipun tidak secara langsung. Pembangunan jalan trans Sumatera sebagai contoh telah memberikan manfaat bagi terbukanya jalur transportasi dan komunikasi sehingga memudahkan proses pembangunan hingga kedaerah-daerah terpencil. Pembangunan lainnya yang yaitu pembangunan mesjid Istiqlal, pembangunan Monumen Nasional, dan pembangunan stadion olahraga kompleks Senayan.

Belajar dari pengalaman ketidak berhasilan Ekonomi Terpimpin yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Lama, Pemerintah Orde Baru mencoba menyusun kembali prioritas-prioritasnya. Pemerintah Orde Baru memutuskan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dan menempatkan pembangunan politik sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Kebijakan-kebijaksanaan dan berbagai peraturan baru dibidang ekonomi dibuat seperti pengendalian inflasi melalui kebijakan ekonomi berimbang, penyusunan kembali pembayaran hutang luar negeri, peraturan baru untuk kembali mengundang modal baik dalam maupun luar negeri untuk menggerakkan industri yang macet dan kebijakan moneter yang ketat untuk menstabilkan peredaran uang dilaksanakan dalam rangka upaya rehabilitasi ekonomi.

Dari kebijakan Orde Baru yang lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi dibanding politik ternyata mampu memperbaiki perekonomian Indonesia yang hampir bangkrut oleh sistem Ekonomi Terpimpin. Pemerintah Orde Baru dengan kebijakan-kebijakannya mampu mengendalikan inflasi dari 635% pada

tahun 1966 menjadi 120% pada tahun 1967. Meskipun angka inflasi belum mencapai angka nol, namun penurunan tingkat inflasi tersebut telah mengurangi kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh negara maupun rakyat Indonesia. Setidaknya hingga akhir 1967 modal asing telah masuk dan mulai membangkitkan kembali industri negara dan nilai indeks hidup di Jakarta telah berangsur membaik.

Dari upaya-upaya rehabilitasi ekonomi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya melalui kestabilan politik maka pertumbuhan ekonomi negara mampu tercapai, sehingga terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Dan hal ini telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Orde Baru

